

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 *Good Corporate Governance*

Corporate governance disebabkan oleh pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan masalah keagenan. Permasalahan keagenan terkait hubungan antara pemilik modal dengan manajer yaitu bagaimana kesulitan sulit pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih pada kegiatan yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. *Corporate governance* penting dalam mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Farrel et al., 2014).

Corporate Governanc merupakan sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan serta memimpin bisnis dan anak korporasi dan bertujuan untuk meningkatkan *corporate value* dan keberlanjutan usaha. Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang *Corporate Governance* yang dikemukakan oleh berbagai pihak baik pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)".

Corporate Governance menurut Kothari *et al.*,(2016) merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, GCG merupakan suatu sistem kompleks yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan *value added* bagi para *stakeholders*. Hal tersebut dikarenakan GCG menentukan pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional sesuai dengan prinsip GCG. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal tersebut bermanfaat bagi perkembangan investasi perusahaan.

2.1.1 Kepemilikan Manajerial

Manajer terbiasa untuk menggunakan hutang yang tinggi bukan dengan tujuan untuk maksimalisasi nilai perusahaan melainkan untuk kepentingan oportunistik mereka (Fhang *et al.*, 2013). Investasi dengan risiko tinggi menyebabkan peningkatan pada *agency cost*. Peningkatan biaya keagenan dapat menyebabkan penurunan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan saham pihak manajemen yang aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).

Kepemilikan manajerial menyetarakan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sehingga segala keputusan manajer akan dirasakan oleh berbagai pihak termasuk manajer. Manajer ikut serta dalam memiliki perusahaan dan tidak akan mengambil keputusan yang oportunistik dalam kebijakan hutang dengan meningkatkan jumlah hutang perusahaan. Manajer akan berusaha untuk mengurangi biaya keagenan dan akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional atau disebut juga persentase kepemilikan saham oleh investor institusional seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain. Kepemilikan institusional dapat mendorong pengawasan yang lebih maksimal terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor.

Kepemilikan institusional dapat menyebabkan kegiatan pengawasannya lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer (Shan, 2014). Kegiatan pengawasannya dapat mengurangi biaya keagenan karena memungkinkan perusahaan menggunakan tingkat hutang yang lebih rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan perusahaan (Al Najjar, 2018).

2.1.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate goverance* bagi Bank Umum pasal 1 ayat 4, komisaris independen adalah:

“Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen”.

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa komisaris independen merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan bebas dari hubungan bisnis. Selain itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal yang diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Eksistensi dari komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengemukakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit tiga puluh persen dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Dewan yang terdiri dari Dewan Komisaris independen memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan manajerial.

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas.

Dalam komisaris independen terdapat jabatan komiaris independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan pegawai atau pihak yang behubungan langsung dengan organisasi, dan tidak dapat mewakili pemegang saham itu sendiri. Dewan komisaris merupakan puncak dari rantai pengelolaan internal perusahaan serta memiliki peranan yang penting bagi perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governace*. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corvorate Governace*), perusahaan yang tercatat wajib memiliki komisaris independen.

2.1.4 Komite audit

Komite audit dibentuk dengan tujuan membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk menerapkan prinsip *corpotare governance* terutama prinsip transparansi yang harus dilakukan secara konsisten dan memadai oleh jajaran perusahaan (Garva, 2015). Menurut Houqe *et al.*, (2017) menyebutkan bahwa tujuan utama dari pembentukan komite audit adalah untuk melakukan peningkatan efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan objektifitas Dewan Komisaris dan seluruh jajarannya.

Komite audit memiliki tugas untuk memberikan nasehatbagi Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan melaksanakan pekerjaan lain

yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris (Peraturan Bapepam No. KEP-29/PM/2004). Berbagai *job desk* komite audit menunjukkan bahwa peran sentral komite audit sebagai pengawas sistem keuangan dan transparansi pelaporan perusahaan ditentukan oleh keberhasilan komite audit dalam menjalankan berbagai kewajibannya.

Berdasarkan tugas dari komite audit yang sentral dalam menentukan keterbukaan pada laporan keuangan, pada penelitian ini karakteristik komite audit diprosikan ke dalam beberapa hal yang terkait, yaitu terdiri dari Ukuran Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kompetensi Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit.

Ukuran komite audit berhubungan dengan jumlah anggota komite audit. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Aktivitas dari komite audit diwujudkan dengan frekuensi rapat yang dilakukan komite audit dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan kompetensi yang dimiliki oleh anggota komite audit berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman dalam *corporate governance*.

2.2. Teori Keagenan

Manajemen laba merupakan suatu kegiatan manipulasi data laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer dikarenakan manajer lebih banyak

mengetahui informasi tentang perusahaan yang dikelolanya. Pemisahan antara pemilik dan pengelola dapat menimbulkan masalah keagenan, masalah tersebut adalah ketidak sejajaran kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal (*principal*) dengan manajer atau agen (*agent*).

Teori keagenan terkait dengan hubungan kontraktual antara seluruh anggota di perusahaan. Razzaque *et al.*, (2016) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa lalu kemudian menetapkan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan agen merupakan manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. hubungan keagenan pada dasarnya adalah pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Pemisahan pemilik perusahaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak dapat berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga hal tersebut mengakibatkan timbulnya biaya keagenan (*agency cost*).

Menurut Vorst (2016), *agency cost* itu meliputi tiga hal, yaitu *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* merupakan pengeluaran yang dibayar oleh prinsipal untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. Biaya tersebut timbul karena adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Agen mungkin dapat membelanjakan sumber daya

perusahaan (*bonding costs*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika ada tindakan menyimpang. Namun masih dapat terjadi perbedaan antara keputusan-keputusan agen dengan keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan agen. Sedangkan *residual loss* adalah nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal.

2.3. Manajemen Laba

Menurut Allen *et al.*, (2013), definisi manajemen laba yaitu perilaku *oportunistik* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan asimetri informasi dan keleluasaan dalam menggunakan dan memilih metode akuntansi.

Menurut Ang *et al.*, (2015), cara pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku *oportunistik* manajer untuk memaksimalkan kemampuannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs*. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting*, dimana manajemen laba dapat memberi manajer fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian yang tak terduga untuk keuntungan berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melewati manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Manajemen laba manipulasi data dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada publik, maka manajer perlu memberikan informasi kepada publik mengenai kondisi keuangan perusahaannya. Hal ini mendorong manajer untuk melakukan *earnings smoothing*. Kondisi ini terjadi, baik pada saat perusahaan melakukan *intial public offering/IPO* maupun pada saat melakukan penawaran *seasoned equity offerings/SEO*. Dua kondisi tersebut berbeda dalam hal tersedianya laporan keuangan yang dipublikasikan disebabkan dalam penawaran kedua dan seterusnya laporan keuangan yang dipublikasikan sudah disediakan kepada publik.

Menurut Boissel *et al.*, (2016), motivasi adanya manajemen laba ada tiga, yaitu:

1. Hipotesis program bonus (*The bonus plan hypothesis*), yang didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer. Motivasi tersebut mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini (Scott, 2000).
2. Hipotesis perjanjian utang (*The debt covenant hypothesis*). Motivasi *debt covenant* disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial.
3. Hipotesis biaya politik (*The political cost hypothesis*). Motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang

menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Manajemen laba merupakan suatu kejadian atau fenomena yang sulit untuk dihindari karena kegiatan ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual dalam menyusun laporan keuangan. Manajemen laba merupakan dampak dari akuntansi sebagai salah sarana komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan kelemahan inheren yang ada pada akuntansi yang menyebabkan adanya *judgement* (Edmans, 2014). *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer untuk melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang dilaporkan dalam keuangan tidak mencerminkan nilai atau kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kim *et al.*, (2016) menyatakan konsep model akrual memiliki dua komponen, yaitu komponen *non-discretionary* dan *discretionary*. Komponen *discretionary accruals* merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan. Komponen *discretionary accruals* diantaranya terdiri dari *future warranty expense*, dan *capitalization assets*. Sedangkan komponen *non-discretionary accruals* ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manajer perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dai (2017) mengemukakan bahwa manajemen laba merupakan gambaran untuk hasil tata kelola perusahaan karena alasan berikut. Pertama, manajemen laba dapat diamati secara tepat waktu.

Sebaliknya, mekanisme tata kelola, termasuk intervensi langsung dalam perubahan strategis atau dampak tidak langsung melalui perdagangan atau ancaman perdagangan, sering tidak dapat diamati. Kedua, sedangkan ada lebih sedikit kesepakatan mengenai mekanisme tata kelola yang optimal seperti ukuran dewan atau independensi dewan untuk perusahaan yang berbeda. Hasil tata kelola, seperti manajemen laba, adalah refleksi yang lebih komprehensif dari karakteristik tata kelola blokir dari pada mekanisme tata kelola khusus.

Zainuldin dan Lui (2018) mengemukakan bahwa manajemen laba telah disorot sebagai salah satu masalah etika paling penting dalam literatur akuntansi. Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keleluasaan mereka untuk menyesuaikan angka-angka laporan keuangan dengan maksud untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak. Oleh karena itu, manajemen laba ditandai oleh tindakan oportunistik manajer dalam memanipulasi angka akuntansi dengan tujuan membuat mereka lebih baik dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, manajemen laba juga mengurangi kualitas pelaporan keuangan karena angka-angka akuntansi yang dimanipulasi tidak secara akurat mencerminkan kondisi ekonomi mendasar yang sebenarnya dan karenanya, mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shan (2015), penelitian ini menyelidiki apakah manajemen laba mengurangi tingkat relevansi nilai dan apakah tata kelola perusahaan yang baik menahan manajemen laba. Menggunakan data *hand*

collected yang terdiri dari 1.012 observasi tahun perusahaan dari semua perusahaan yang terdaftar di Shanghai SSE 180 dan Shenzhen SSE 100, hasilnya menunjukkan bahwa dampak negatif dari relevansi nilai bagi perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlibat dalam keterlibatan manajemen laba. Selain itu, perusahaan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik lebih cenderung membatasi manajemen laba daripada yang tidak.

Chang *et al.*, (2018) melakukan penelitian untuk menyelidiki apakah manajemen laba nyata dikaitkan dengan manfaat pencegahan atau biaya agensi kepemilikan kas. Peneliti menemukan bahwa manajemen laba riil merusak nilai dari kepemilikan kas. Namun, nilai kepemilikan tunai tidak terkait dengan manajemen laba berbasis akrual, yang tidak berpengaruh pada arus kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba riil merusak nilai kepemilikan kas terutama di perusahaan yang memiliki masalah agensi potensial atau perusahaan yang menghadapi kendala keuangan. Selain itu, manajemen laba yang nyata mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan, dan merusak nilai arus kas dari kegiatan bisnis masing-masing. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung kesimpulan bahwa manajemen laba riil dikaitkan dengan biaya agensi kepemilikan kas.

Penelitian tentang “*Earnings management, corporate governance and expense stickiness*” yang dilakukan oleh Xue dan Hong (2015) mengemukakan bahwa keluwesan biaya dan pengeluaran (*Cost and expense stickiness*) adalah

masalah penting dalam penelitian akuntansi dan ekonomi, dan literatur telah menunjukkan bahwa kelengketan biaya tidak dapat dipisahkan dari motivasi manajer. Dalam penelitian ini, peneliti menguji efek yang manajemen laba pada kelengketan biaya. Mendefinisikan laba positif kecil atau laba kecil meningkat sebagai manajemen laba, peneliti mengamati kelonggaran biaya yang signifikan dalam sub-sampel non-pendapatan-manajemen, dibandingkan dengan sub-sampel pengelolaan laba. Ketika pengeluaran dibagi menjadi R & D, iklan dan pengeluaran umum lainnya, kita menemukan bahwa manajer mengendalikan pengeluaran terutama dengan mengurangi biaya umum. Peneliti lebih lanjut juga memeriksa efek *corporate governance* pada kelengketan pengeluaran. Dengan menggunakan analisis faktor, peneliti mengekstrak delapan faktor utama dan menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengurangi *cost stickiness*. Akhirnya, peneliti menyelidiki efek interaksi manajemen laba dan tata kelola perusahaan pada *cost stickiness*. Hasil empiris menunjukkan bahwa *good corporate governance* dapat lebih mengurangi *cost stickiness*, meskipun efeknya tidak sekuat manajemen laba.

Penelitian berjudul “*Corporate Governance, Earnings Management and Tax Management*” yang dilakukan oleh Mulyadi dan Anwar (2014) melakukan penelitian dengan fokus tata kelola perusahaan, pajak, serta manajemen laba, dimana peneliti mengungkapkan bahwa beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada dampak yang signifikan dari tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan dan manajemen pajak perusahaan. Dalam

penelitian ini peneliti memfokuskan pada jumlah dewan, jumlah pengungkapan kompensasi dewan dan dewan independen sebagai proksi *corporate governance*. Peneliti menggunakan akrual diskresioner untuk mengukur manajemen laba, dan tarif pajak efektif sebagai pengukuran manajemen pajak. Temuan kami menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba dan manajemen pajak.

Penelitian tentang “*Employee Diff, Free Cash Flow, Corporate Governance and Earnings Management*” yang dilakukan oleh Nasution dan Bukit (2015) mengemukakan bahwa manipulasi laba telah menjadi tren negatif dalam literatur akuntansi, yang dianggap sebagai alat bagi manajer untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Dalam hal ini, para manajer mengubah dan memanipulasi laba, dengan tujuan untuk menipu dan menyesatkan pandangan pembaca laporan keuangan, tentang kondisi riil perusahaan. Karena manipulasi pendapatan adalah praktik yang tidak baik, itu mengurangi transparansi dan meningkatkan informasi penipuan. Manajemen laba yang dilakukan secara sengaja oleh manajer dapat dianggap sebagai penyimpangan atau penipuan. SEC di Amerika Serikat mengungkapkan beberapa perusahaan besar yang bangkrut disebabkan oleh praktik manipulasi laporan keuangan melalui manajemen laba. Manajer memanipulasi laba atas dorongan dua motif. Pertama, motif oportunistik bahwa manajer mengubah angka laba perusahaan untuk menyesatkan investor untuk memenuhi kepentingan pribadi manajer. Kedua, motif informasi, yaitu manajer mengimplementasikan manajemen laba untuk

menyampaikan informasi pribadi mereka dan harapan tentang prospek masa depan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Luthan dan Ilmainir (2015) yang berjudul “*The effect of good corporate governance mechanism to earnings management before and after IFRS conergence*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan dalam mekanisme “*Good Corporate Governance*” pada manajemen laba, sebelum dan sesudah PSAK converence IFRS, pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 136 perusahaan manufaktur, dimana sampel yang didapat adalah 65 perusahaan sesuai dengan area pemilihan sampel. Mekanisme GCG adalah variabel independen yang mencakup mekanisme internal dan eksternal. Studi ini menyimpulkan bahwa pengaruh mekanisme GCG yang berbeda terhadap manajemen laba, tergantung pada *proxy* yang digunakan untuk mekanisme GCG.

Riwayati *et al.*, (2015) dengan penelitian tentang “*Implementation of Corporate Governance Influence to Earnings Management*”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi tata kelola perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data primer dengan mengumpulkan 70 responden. Responden terdiri dari para ahli, manajer, pembuat keputusan, dan pemilik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengurangi efek buruk dari manajemen laba.

Kazemian dan Sanusi (2015) dengan penelitian tentang “*Earnings Management and Ownership Structure*”, penelitian mengemukakan bahwa

manajemen laba memiliki sejarah panjang dan kaya. Konflik keagenan, insentif, rasionalisasi, peluang plus memiliki kemampuan di antara para manajer untuk memanipulasi laporan keuangan membuat mereka melakukan penipuan. Celah dalam standar atau penyimpangan dari kegiatan operasional nyata mendorong situasi ini untuk memperpanjang. Menurut teori agensi, pemisahan kepemilikan dan kontrol memunculkan insentif manajer untuk memilih dan menerapkan estimasi dan teknik akuntansi yang bisa menambah kekayaan mereka sendiri. Masalah ini telah menjadi lebih penting dalam beberapa tahun terakhir karena lebih banyak perusahaan terdaftar di bursa saham sebagai perusahaan publik. Dalam ulasan ini, peneliti menekankan studi yang memajukan pemahaman manajerial manajemen laba dan teori agensi. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau pada beberapa penelitian besar yang dilakukan dari berbagai negara, memeriksa hubungan antara struktur kepemilikan (dan subsetnya) dan manajemen laba.

Nazir dan Afza (2018) dengan penelitian tentang “*Does managerial behavior of managing earnings mitigate the relationship between corporate governance and firm value? Evidence from an emerging market*” mengemukakan bahwa hubungan antara tata kelola perusahaan dan pilihan manajerial untuk penciptaan nilai adalah topik yang terus menarik minat para peneliti. Salah satu keputusan manajerial paling signifikan yang mempengaruhi nilai adalah *Discretionary Earnings Management* (DEM) yang merupakan penyesuaian penilaian dalam laba akuntansi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer untuk

menaikkan nilai perusahaan untuk sementara. Struktur tata kelola perusahaan yang efektif untuk mengendalikan perilaku oportunistik para manajer ini mungkin dapat membuat laba akuntansi lebih dapat diandalkan dan lebih informatif bagi para pemangku kepentingan dan karenanya, meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan bersama dengan peran moderat DEM. Hasilnya melaporkan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan dan positif mempengaruhi nilai perusahaan yang menegaskan peran positif tata kelola perusahaan dalam memitigasi masalah agensi dan meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, mekanisme tata kelola perusahaan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajer dalam memanipulasi laba yang dilaporkan. Lebih lanjut, hasil melaporkan bahwa perilaku manajer adalah oportunistik terhadap pengelolaan laba dan mereka menghancurkan nilai perusahaan saat ini dan selanjutnya dengan memanipulasi laba akuntansi yang dilaporkan. Akhirnya, perilaku oportunistik para manajer untuk memanipulasi laba secara negatif memoderasi hubungan positif yang positif dari tata kelola perusahaan dan nilai perusahaan.

2.4 *Leverage*

Hutang dapat diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi yang akan timbul di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban di masa kini atau masa sekarang dari suatu badan usaha yang akan dipenuhi dengan

memindahkan aktiva atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa depan sebagai akibat dari transaksi yang sudah terjadi (Kolsi dan Grassa, 2017). Hutang dapat juga didefinisikan sebagai semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum dapat terpenuhi. Hutang perusahaan merupakan sebuah mekanisme untuk menyatukan kepentingan manajer dengan semua *stakeholder*.

Keputusan pendanaan perusahaan terkait dengan berbagai keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari berbagai pihak yaitu baik dari dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal dapat bersumber dari modal sendiri dan atau melalui hutang. Rashid *et al.*, (2018) menyatakan bahwa hutang menjadi salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya.

Menurut Schmidt dan Fahlenbrach (2017) mengemukakan bahwa penggunaan hutang diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan. Penambahan hutang dalam struktur modal dapat mengurangi penggunaan saham sehingga dapat mengurangi biaya keagenan ekuitas. Konsekuensi dari kebijakan ini yaitu perusahaan menghadapi biaya keagenan hutang dan risiko kebangkrutan (Wijethilake *et al.*, 2015). Hal ini disebabkan perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara berkala. Kondisi ini menyebabkan manajer bekerja keras untuk meningkatkan laba

sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Namun apabila manajer tidak mampu memenuhi kewajiban atas penggunaan hutang maka perusahaan akan berisiko untuk mengalami kebangkrutan dan akan mengancam posisi manajer di perusahaan.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Johl *et al.*, (2016) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk mengawasi. Ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan mengalami peningkatan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyeimbangkan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen (Audousset *et al.*, 2016). Oleh sebab itu permasalahan keagenan diasumsikan dapat hilang ketika seorang manajer juga merupakan seorang pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. Kepemilikan saham yang dilakukan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, jadi dengan adanya kepemilikan manajerial, manajer akan

cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham, antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan. Proksi dapat digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial menggunakan MOWN (*Managerial Ownership*), yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dibagi jumlah saham yang beredar (Claessens dan Yurtoglu, 2013).

Penelitian Dai (2017) mengemukakan bahwa bahwa kepemilikan manajerial serta kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun proporsi Dewan Komisaris independen dan Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₁: Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat membatasi manajer untuk melakukan manipulasi dalam manajemen laba. Investor institusional mampu mengurangi insentif bagi perilaku *oportunistik* manajer dengan memberikan derajat monitoring yang lebih tinggi

terhadap perilaku manajerial dibandingkan dengan investor individu (Chang *et al.*, 2017).

Kolsi dan Grassa (2017) menemukan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi mampu membatasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah manajemen laba dapat bersifat efisien, tidak selalu *oportunistik*. Jika manajemen laba tersebut efisien, maka kepemilikan institusional yang tinggi justru akan meningkatkan keinformatifan laba dalam mengemukakan informasi privat, tetapi jika manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan membatasi manajemen laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal (Rashid *et al.*, 2018).

Pengawasan oleh investor institusional dengan melakukan menempatkan dewan ahli (*decision expert*) dan tidak dibiayai oleh perusahaan. Dewan ahli tidak berada dibawah pengawasan *Chief*

Executive Official (CEO) sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja manajer dengan lebih efektif.

H₂: Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Houqe *et al.*, (2017) menelaah tentang peran Dewan Komisaris dengan latar belakang bidang keuangan dalam mengurangi tindakan manajemen laba. Penelitian ini mengemukakan bahwa makin sering Dewan Komisaris bertemu, maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Agar laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang bermutu sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* maka *corporate governance* perusahaan harus mempunyai struktur yang dikelola dengan baik, salah satu struktur *corporate governance* yang mempunyai peranan dan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah peranan komisaris independen agar tidak terjadi manipulasi data akuntansi di dalam laporan keuangan. Keberadaan komisaris independen yang terdapat dalam perusahaan memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak diluar manajemen perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer

internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen diproksikan menggunakan KI (Komsaris Independen), yaitu terdiri dari anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan terhadap total Dewan Komisaris (Pham *et al.*, 2011). Menurut Edmans (2014) menemukan bahwa kepemilikan manajerial, komposisi Dewan Komisaris independen, jumlah pertemuan komite audit, kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, dan Komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan *leverage* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H₃: Proporsi Dewan Komisaris independen mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.4. Pengaruh Komite audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit adalah sebuah badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keandalan. Badan ini bertugas untuk membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit yang ada dalam suatu

perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan diawasi dengan baik.

Laporan keuangan digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan berperan penting dalam pekerjaan seorang manajer, manajer menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya atas sumber daya pemilik. Faktor penting dalam laporan keuangan yang dipergunakan untuk menilai kinerja manajer yaitu laba. Berdasarkan *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Manajemen menyadari bahwa terdapat kecenderungan untuk memperhatikan laba dalam menilai kinerja seorang manajer, hal tersebut mendorong timbulnya perilaku yang menyimpang, salah satu bentuknya adalah laporan keuangan yang kurang konservatif. Komite Audit bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan dan secara independen memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Penelitian Vorst (2016) menunjukkan bahwa variabel dependen manajemen laba dan variabel independen kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris independen, ukuran Dewan Komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris independen,

ukuran Dewan Komisaris, keberadaan komite audit, dan Komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Rahardja (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adalah kecakapan manajer, proporsi Dewan Komisaris independen, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

H4: Komite audit mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

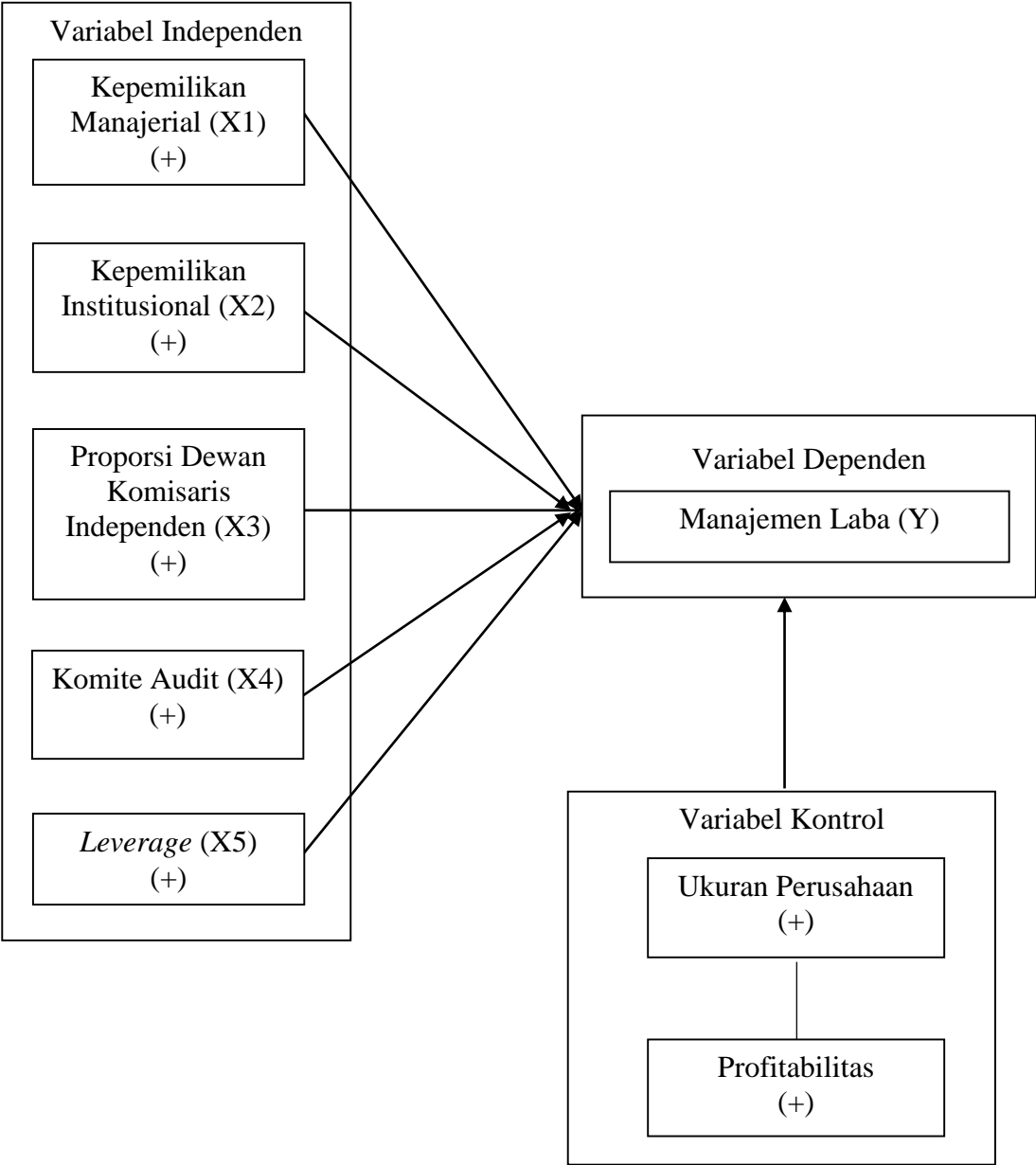
2.5.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin besar rasio *leverage*, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Vorst (2016) dalam hipotesis *debt covenant* bahwa motivasi *debt covenant* disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial (Ang *et al.*, 2015). Oleh sebab itu, perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivasnya, dan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Leverage diketahui sebagai rasio antara total kewajiban dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar rasio *leverage*, maka semakin tinggi juga nilai hutang suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivitya. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan lebih cenderung untuk melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Karena perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi tentunya memerlukan laporan keuangan yang terlihat baik agar para investor tetap tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Penelitian Kothari *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa *leverage*, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi, tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Farrel *et al.*, (2014) memiliki hasil penelitian tersebut adalah *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

H₅: *Leverage* mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap manajemen laba.

2.6. Kerangka Penelitian



Gambar 2.1.Kerangka Penelitian